



Pengaruh Perencanaan Pembangunan Era Orde Lama pada Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

✉ **Ananta Daru Pratiwi¹, Alifia Maulina², Aldilla Amalia³, M. Fahza Rahmadi Rega⁴, Ahmad Agil Surya R.⁵**

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.

Received: October 12, 2022; Published: February 28, 2023

ABSTRACT

The reign of Indonesia's Old Order lasted for about 23 years, from 1945 to 1968 under the leadership of President Soekarno. The economic situation in the early days of independence (1945-1949) was quite bad, including various problems such as very high inflation, the Dutch economic cessation since November 1945, and massive exploitation during the colonial period. However, during the old order, President Soekarno had a development strategy based on this development plan. This development plan put more emphasis on political development efforts where at that time the government was trying to maintain national independence. In 1947 the government started planning by making a Three-Year Production Plan for the Republic of Indonesia in 1948, 1949, and 1950. This program focused on agriculture, animal husbandry, industry, forestry, and other programs.

Keywords: *Development Planning; Economy; Old Order.*

ABSTRAK

Masa Pemerintahan Indonesia Orde lama berjalan sekitar 23 tahun yaitu dari tahun 1945 1968 dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Keadaan ekonomi di waktu awal kemerdekaan (1945-1949) cukup terpuruk, diantaranya berbagai masalah seperti: Inflasi yang sangat tinggi, adanya penghentian ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 dan eksploitasi besar besaran di masa penjajahan. Meskipun demikian pada masa orde lama, presiden Soekarno memiliki strategi pembangunan yang didasarkan atas perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan pembangunan ini lebih menekankan pada usaha pembangunan politik dimana pada masa itu pemerintahan berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan nasional. Pada tahun 1947 pemerintah memulai perencanaan dengan membuat Plan Produksi Tiga Tahun RI dengan jangka tahun 1948, 1949, dan 1950. Program ini di fokuskan pada bidang pertanian, peternakan, perindustrian, kehutanan, beserta program lainnya.

Kata kunci: *Perencanaan Pembangunan; Ekonomi; Orde Lama.*

How to cite:

Pratiwi, A. D., Maulina, A., Amalia, A., Rega, M. R., & Surya R., A. A. (2023). Pengaruh Perencanaan Pembangunan Era Orde Lama pada Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Journal of Economics Development Issues*, 6(1), 1-9. <https://doi.org/10.33005/jedi.v6i1.151>.

✉ Corresponding author email:

¹08020120029@student.uinsby.ac.id, ²08010120003@student.uinsby.ac.id,

³08010120002@student.uinsby.ac.id, ⁴08010120017@student.uinsby.ac.id,

⁵08020120026@student.uinsby.ac.id

This is an open-access article
under the CC-BY License



PENDAHULUAN

Orde lama dimulai pada tahun 1959-1967 yang merupakan masa pemerintahan presiden Soekarno. Pada masa orde lama, perencanaan pembangunan di Indonesia yang diawali dengan tercetusnya “ Panitia Pemikir Siasat Ekonomi”. Panitia tersebut di bentuk pada 12 April 1947 yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Organisasi ini memiliki dasar hukum yang kuat dan struktur organisasi yang jelas. Hal yang paling utama adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan pada masa ini merupakan landasan dasar untuk menciptakan Indonesia yang lebih damai, kondusif, dan sejahtera.

Indonesia di awal kemerdekaannya memiliki keadaan ekonomi yang sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh inflasi yang tinggi akibat beredarnya mata uang lebih dari satu. Hal lain yang memperburuk dan menghalangi perencanaan pembangunan adalah kondisi politik Indonesia yang masih belum stabil yang mengakibatkan upaya pembangunan tersendat dan sulit untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Keadaan politik yang kurang stabil itu terjadi pada tahun 1960-1965.

Pada masa orde lama, Indonesia berada pada titik perekonomian yang kurang baik akibat kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno masih sangat labil. Banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi seperti politik yang belum kondusif dan sistem pemerintahan yang belum baik yang mengakibatkan terhambatnya pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi diantaranya yakni persediaan beras yang menipis sementara Indonesia masih belum memiliki kemampuan untuk mengimport beras, harga barang yang semakin mahal, dan munculnya gerakan G30S PKI yang berakhir dengan tumbangnya kekuasaan presiden Soekarno. Meskipun demikian pada masa orde lama, presiden Soekarno memiliki strategi pembangunan yang didasarkan atas perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan pembangunan ini lebih menekankan pada usaha pembangunan politik dimana pada masa itu pemerintahan berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan nasional. Pada tahun 1947 pemerintah memulai perencanaan dengan membuat Plan Produksi Tiga Tahun RI dengan jangka tahun 1948, 1949, dan 1950. Program ini di fokuskan pada bidang pertanian, peternakan, perindustrian, kehutanan, beserta program lainnya.

Selain itu, pada tahun tersebut terdapat Kasimo Plan yang di susun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yakni J Kasimo yang berfokus pada swasembada pangan. Pada tahun 1947 juga dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau bisa disebut Biro Perancang Negara yang dibentuk pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo. Tugas dari Biro Perancang Negara yakni merancang pembangunan jangka panjang dan berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 1956-1961. Tetapi sangat disayangkan, badan ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat yang pada akhir tahun 1957 sampai awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor sekaligus pendapatan negarapun ikut merosot. Selain diakibatkan oleh hal tersebut, ada hal lain yakni adanya perjuangan pembebasan Irian Barat dan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia yang mengakibatkan gejolak ekonomi. Akibatnya ada ketegangan antara pusat dan daerah yang akhirnya menyebabkan banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, MPRS menetapkan tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional yakni TAP MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969 dan ketetapan No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis- Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Dari uraian tersebut maka muncul beberapa rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana dampak Plan Produksi Tiga Tahun serta Kasimo Plan pada kesejahteraan masyarakat Indonesia? 2) Bagaimana dampak RPLT atau Rencana Pembangunan Lima Tahun pada kesejahteraan masyarakat Indonesia? 3) Bagaimana dampak penetapan MPRS pada perencanaan pembangunan di Indonesia? 4) Bagaimana dampak Reforma Agraria pada perencanaan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia?

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui dampak Plan Produksi Tiga Tahun serta Kasimo Plan pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. 2) Mengetahui dampak RPLT pada

kesejahteraan masyarakat Indonesia. 3) Mengetahui dampak penetapan MPRS era orde lama pada perencanaan pembangunan di Indonesia. 4) Mengetahui dampak Reforma Agraria pada perencanaan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Dalam studinya “Rezim Politik dan Masalah Perencanaan Pembangunan di Indonesia” (Nurainy, 2016), mengklaim bahwa perencanaan nasional di Indonesia secara konsisten bergeser dari satu tatanan ke tatanan lainnya karena pergantian rezim selalu dianggap sebagai pemulihan total rezim sebelumnya. kebijakan. Rencana yang lahir dari itu termasuk program politiknya. Apapun bentuknya, Perencanaan Nasional membutuhkan komitmen, kesepakatan politik, dan kesepakatan sosial untuk mendekatkannya dengan kebutuhan mendasar masyarakat setelah diadopsi sebagai instrumen perencanaan negara. Cara pandang Indonesia dalam membuat dokumen perencanaan berdaulat anggaran, yang harus memperhatikan kepentingan seluruh warga negara dengan menggunakan peta negara (Geopolitik) sebagai landasan pemikiran. Metode di mana sebuah rencana dibuat di suatu negara akan bergantung pada ideologi politiknya.

Menurut Hariyadi (2021), dalam kajiannya yang berjudul “Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia”, kebijakan pembangunan nasional menunjukkan bagaimana faktor-faktor filosofis, politik, dan ekonomi secara periodik mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Tingkat keterlibatan birokrasi perencanaan dalam proses teknokratis selanjutnya dipengaruhi oleh arah politik negara, yang juga menentukan proses politik yang mendahului perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan nasional, yang dioperasionalkan sebagai bagian dari agenda politik negara dan mengatur proses teknokratis di bawah kepresidenan Presiden Soekarno, merupakan komponen kunci dari periode itu. Sementara itu, di bawah Presiden Soeharto, prosedur teknokratis birokrasi perencanaan pembangunan mendominasi perencanaan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pengaruh sains lebih kuat dari Ini menunjukkan bahwa sains memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada politik. Model perencanaan pembangunan nasional pasca reformasi justru menekankan saling ketergantungan proses politik dan teknologi dari hulu hingga hilir. Kedua prosedur tersebut harus dilihat sebagai fase yang krusial dan saling mempengaruhi dalam perencanaan pertumbuhan nasional. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi, diperlukan model perencanaan pembangunan nasional yang baru, dan harus dikaitkan dengan pembangunan sosial yang objektif. Dengan pendekatan berbasis pengetahuan, mengkaji empirisme di banyak negara pada model kebijakan perencanaan pembangunan nasional mereka, dan belajar dari empirisme Indonesia dengan beragam teknik yang telah digunakan, opsi yang dapat diambil harus dibuka secara luas. Aspek filosofis, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi model kebijakan perencanaan pembangunan nasional setidaknya menjadi alat untuk menentukan model mana yang terbaik untuk Indonesia di masa depan.

Pemerintah Orde Lama mendirikan Badan Perusahaan Pembukaan Pangan dan Tanah (BMPT) pada tahun 1959 dengan tujuan utama memperluas penyediaan sarana produksi pertanian, menurut Mardianto & Djauhari (n.d.) dalam penelitiannya berjudul “The Commodity Based Approach to Agricultural Development vs. Ekoregion: Upaya Menemukan Jalan Tengah.” Perusahaan ini memiliki dua perusahaan, Padi Sentra dan Mekatani, yang tanggung jawab utamanya adalah akuisisi, distribusi, dan penyediaan sarana produksi pertanian (seperti benih unggul, pupuk, dan obat-obatan) dan pembukaan lahan pertanian, khususnya di luar Jawa.

Pembangunan desa secara historis menjadi fokus perhatian pemerintah sejak Indonesia merdeka, namun strategi pembangunan desa terkadang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, menurut (Nain, 2019) dalam bukunya “Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosial-historis”. Pergeseran strategi bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan pembangunan desa yang dianggap paling berhasil untuk jangka waktu tertentu. Karena fokus pada peningkatan produksi pangan, "Rencana Kesejahteraan Kasimo", program pembangunan desa yang diperkenalkan pada tahun 1952, setara dengan pembangunan pertanian. Dusun ini telah mengalami perubahan fisik dan sosial sepanjang pertumbuhannya, dimulai dari Orde Baru dan berlanjut hingga Orde Reformasi hingga saat ini. Perubahan fisik dapat dilihat dari semakin

berkurangnya desa-desa terpencil serta perubahan sosial, khususnya transisi dari budaya tradisional ke budaya kontemporer. Desa bahkan mulai berpartisipasi dalam pembangunan global. Desa bukan lagi masyarakat statis yang penuh romansa, namun inisiatif dan aktivitas modernisasi terkadang mengikis tatanan sosial yang sebelumnya telah terlembagakan di desa.

Menurut Rakhman & Hidayat (2022) dalam kajiannya yang berjudul “Kebijakan Ekonomi Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)”, masa sebelum Demokrasi Terpimpin Indonesia diliputi sejumlah tantangan, termasuk sulitnya menentukan mata uang yang akan digunakan, blokade yang dikenakan Belanda terhadap ekspor Indonesia, dan masalah rendahnya pendapatan masyarakat, yang berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan negara. Selain itu, sistem ekonomi kolonial masih berlaku di Indonesia, dan bisnis Belanda terus bertahan monopoli ekonomi negara. Dalam benaknya, Soekarno memperoleh banyak pengetahuan tentang Marxisme dari ajaran Karl Marx, tetapi ia hanya menerapkan metode ilmiahnya pada pengelolaan sistem politik dan ekonomi. Idenya tentang Ekonomi Terpimpin, yang kemudian akan dijabarkan oleh Manipol-Usdek. Dekon dan Rencana Pembangunan Universal.

Definisi perencanaan ekonomi, menurut Collections (n.d.), adalah upaya sadar dari organisasi pusat untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus bahkan mengendalikan perubahan variabel ekonomi yang signifikan (seperti PDB, konsumsi, investasi, tabungan, dll.) dari suatu negara atau wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, konsep pengaruh, arah, dan kontrol merupakan inti dari perencanaan ekonomi. Kumpulan tujuan(sasaran) ekonomi kuantitatif yang tepat yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu juga dapat dianggap sebagai rencana ekonomi. Strategi ekonomi dapat dikembangkan sepenuhnya atau hanya dikembangkan sebagian. Sebuah strategi menyeluruh menjabarkan tujuan untuk semua aspek penting dari ekonomi nasional. Rencana parsial, di sisi lain, hanya membahas sektor-sektor tertentu dari ekonomi nasional, seperti industri manufaktur, pertanian, dan perdagangan luar negeri. Dalam studinya “Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Studi Banding Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)” terbitan tahun 2018 (Sutadi dkk, 2018) menegaskan bahwa salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk menangani dengan penataan kembali pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah adalah reforma agraria. Restrukturisasi agraria telah terjadi di Indonesia sebanyak tiga kali sepanjang sejarahnya, yaitu pada masa Land Reform (1963–1965), Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) (2007–2014), dan Reforma Agraria (2017-2019). Selama periode implementasi (1945-1965), kebijakan kolonial dan efek feodalisme yang masih ada baik di Barat maupun hukum adat menyebabkan dualisme hukum di Indonesia, yang mempengaruhi kepemilikan, penggunaan, dan pengaturan tanah. Oleh karena itu, untuk menghapus sisa-sisa feodalisme, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan regulasi yang secara kolektif mengatur pelaksanaan land reform di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikel, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Pokok-Pokok Agraria, dan UU No. 56 Prp 1960 tentang Penetapan Pertanian. Kebijakan pertanahan untuk pembangunan merupakan fokus utama dari land reform pada tahap implementasinya (1965-1999). Tiga kebijakan yang secara khusus mencirikan kebijakan pertanian pada masa Orde Baru: Kedua, penolakan terhadap adanya kebijakan fundamental yang mengatur masalah agraria di Indonesia menyebabkan pelaksanaan program land reform hanya terhenti pada masalah teknis administrasi. Ketiga, legitimasi keikutsertaan ormas tani dalam proses pelaksanaan agenda land reform di Indonesia dihilangkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Transmigrasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Land Reform keduanya memuat kebijakan ini. Peraturan penguasaan tanah diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1991. Obyek Independen Land reform.

Indonesia adalah negara agraris, klaim Clarissal et al. (2020), dalam kajiannya yang berjudul “Implementasi Reforma Agraria di Masa Orde Lama dan Reformasi”. Masyarakat agraris mensyaratkan bahwa semua warga negara memiliki tanah. karena mayoritas penduduk Republik Indonesia mengandalkan lahan untuk kegiatan seperti pertanian. Masalah tanah merupakan masalah khas pemilik tanah yang muncul

dalam budaya agraris. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan landreform. karena masalah pertanian bisa diselesaikan dengan land reform. Kata "tanah" dan "reformasi" berasal dari bahasa Inggris. Reformasi "perombakan atau modifikasi organisasi pertanian baru" dan Tanah "tanah". Reforma agraria merupakan komponen fundamental dari land reform, yang diartikan sebagai restrukturisasi sistem penguasa dan pemilik tanah. Dan evolusi sengketa agraria dari satu era ke era berikutnya masih menjadi tontonan yang menyedihkan. Meskipun telah dibentuk suatu peraturan yang menekankan pentingnya reforma agraria, namun perbaikan dalam bentuk pembaruan tersebut belum juga dilaksanakan. Prestasi bangsa lain seharusnya membuat kita mampu melihat diri sendiri dengan baik, dan memahami bagaimana mengakhiri momok di bangsa ini. UUPA secara historis merupakan aturan komprehensif pertama yang mengatur pengalihan hak milik dari Belanda/Eropa, dan didahului oleh sejumlah sistem kepemilikan tanah. Undang-undang ini diubah untuk mencerminkan keadaan Indonesia, yang pada saat yang sama merebut wilayah yang sebelumnya dikuasai Belanda. Pemerintah Indonesia saat ini belum menangani diskriminasi dalam kepemilikan tanah. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah agraria terus mengadvokasi reforma agraria sebagai jawabannya. Melalui legislasi dan program-program yang dipikirkan matang-matang untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, reforma agraria berupaya untuk merestrukturisasi kepemilikan, penggunaan, dan penggunaan tanah yang tidak setara. Undang-Undang Pokok Agraria (HUPA) 1960 menjadi pedoman bagi kesejahteraan masyarakat kita, meskipun reforma agraria bagi sejarah Indonesia mungkin merupakan utopia yang dibawa Soekarno untuk mengembangkan undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan tanah saat itu. Kelangsungan reformasi agraria Indonesia, meskipun masih ada, dibayangi oleh isu penting lainnya. Siapa pun yang memiliki kekuatan untuk mengatasi ketimpangan tanah tampaknya menutup mata terhadap kekurangan dan keuntungan dari reforma agraria yang efektif dan bagaimana ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi setelah semangat reforma agraria era Soekarno memudar.

Dalam kajiannya yang berjudul "Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis," Komala et al. (2021) menyatakan bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat berada pada kelas kemiskinan rendah sebelum adanya pelaksanaan reforma agraria. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap rumah tangga petani memiliki pendapatan yang buruk karena kurangnya pendidikan, kelangkaan pilihan pekerjaan, dan sedikitnya lahan yang dimiliki petani. Minimnya kesempatan pendidikan dan akses manfaat, seperti kemampuan memperoleh lahan untuk bercocok tanam, mengakibatkan kondisi sosial petani di Desa Pasawahan yang kurang baik. Kesejahteraan rumah tangga petani meningkat dari kesejahteraan rendah menjadi menengah setelah diterapkannya reforma agraria ini. Hal ini didukung oleh kegiatan pasca reforma agraria antara lain pertanian, pembangunan sekolah, koperasi, dan kemampuan mengembangkan tempat tinggal, serta peningkatan kesejahteraan karena penambahan aset modal bagi petani.

Menurut Wicaksono & Purbawa (2018), pelaksanaan reforma agraria belum optimal karena kurangnya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan terkait, karena program ini akan berdampak signifikan jika didukung oleh kementerian. Kajian tersebut berjudul "Utang Negara dalam Reforma Agraria, Kajian Pelaksanaan Amanat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia". BPN hanya diperbolehkan menggunakan sertifikat tanah masyarakat sebagai sumber tambahan uang untuk mendongkrak potensi ekonomi masyarakat. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam koridor akses reformasi perlu memiliki landasan konseptual yang konkrit dan dapat dipahami dalam bentuk regulasi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam hal ini, komitmen politik Nawacita diuji dalam upaya menciptakan regulasi yang dapat diterima oleh seluruh kementerian dan lembaga. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat sangat penting bagi keberhasilan reforma agraria.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Pendekatan ini mengedepankan ulasan literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, esai dan literatur lainnya. Sumber literatur ini diperoleh dari mesin pencarian google scholar, scopus, dan sci-hub. Literatur yang dipilih sebagai sumber artikel ini dipilih dari literatur yang terbit pada 10 tahun terakhir. Adapun tujuan dipilihnya terbitan artikel selama 10

tahun adalah karena pertama, menjaga keterbaruan data dan bahasan yang dijadikan pendukung artikel. dan kedua, menjaga relevansi atau keterkaitan materi. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini yaitu dengan pendekatan komparatif dengan sumber literatur yang berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan menggunakan jenis data sekunder serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif, karena berguna untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam suatu masalah. Dari penelitian ini dilakukan berdasarkan dengan mempelajari referensi-referensi artikel dan internet. Dari analisis data yang telah dilakukan ini penulis mendefinisikan tentang bagaimana dampak perencanaan pembangunan ekonomi era orde lama pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, penulis juga mencari tahu tentang dampak plan produksi tiga tahun Kasimo plan, rencana produksi lima tahun pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan dampak penetapan MPRS pada perencanaan pembangunan Indonesia..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasimo Plan

Rencana Kasimo, sering dikenal sebagai Rencana Kasimo, adalah inisiatif pemerintah yang dirancang untuk menjawab tantangan perencanaan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pangan. Ignatius Joseph Kasimo H meluncurkan rencana Kasimo pada tahun 1948. Menteri Penyediaan Pangan Rakyat pada saat itu adalah Ignatius Joseph Kasimo H. Rencana Kasimo diilhami oleh Indonesia yang memiliki masalah dengan perbendaharaan negara, pajak, dan pangan di awal kemerdekaannya. Ignatius Joseph Kasimo H yang saat itu menjabat Menteri Penyediaan Pangan Rakyat memulai Rencana Kasimo atau Rencana Kasimo ini sebagai akibat dari isu-isu yang hadir. Melalui intensifikasi dan penyuluhan pertanian, Rencana Kasimo berupaya meningkatkan produksi pangan. Rencana Kasimo mencakup jadwal produksi tiga tahun untuk industri makanan dari tahun 1948 hingga 1950. Dan segera setelah rencana ini dilaksanakan, perekonomian Indonesia mulai membaik secara bertahap.

Awal Rencana Kasimo

Ketika Belanda menguasai Yogyakarta, ibu kota negara pada saat itu, ini dimulai. Hubungan luar negeri antara Indonesia dengan negara lain juga putus. Masuknya senjata, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya seperti medis dan transportasi juga diblokir oleh Belanda. Kekurangan pangan berkembang di Indonesia sebagai akibat dari blokade, dan ratusan ribu orang mulai meninggalkan provinsi-provinsi yang diduduki Belanda. IJ Kasimo, seorang Menteri Muda, terinspirasi oleh hal ini untuk membuat Rencana Kasimo, kadang-kadang dikenal sebagai Rencana Kasimo, yang merupakan rencana produksi tiga tahun yang berlangsung dari tahun 1948 hingga 1950.

Konsep asli Rencana Kasimo dipengaruhi oleh pola asuh IJ Kasimo, di mana ayahnya bertugas sebagai prajurit Keraton Yogyakarta. IJ Kasimo menyaksikan penderitaan penduduk asli selama waktu itu. Selama pemerintahan perusahaan kolonial Belanda, terjadi ketidakadilan dan penindasan yang menjijikan. IJ Kasimo ingin membuat kebijakan yang cenderung melindungi keadilan terhadap rakyat Indonesia mengingat situasi dan sejarah ini. Rancangan Rencana Kasimo 1947 menyebabkan realisasinya pada tahun 1948. Tujuan utama Rencana Kasimo adalah sebagai berikut:

- Mencukupi seluruh kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia, khususnya beras, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, ikan, dan daging.
- 10% kebutuhan sandang mandiri penduduk Indonesia terpenuhi.
- Bekerja untuk memiliki produksi ekstra yang tersedia untuk ekspor.

Rencana Kasimo juga mencakup hal-hal berikut selain tujuannya:

1. Penanaman lahan kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar.
2. Intensifikasi di Jawa dengan memperbanyak penaburan benih unggul
3. Menghindari penyembelihan hewan yang sangat penting untuk penciptaan makanan.
4. Sebuah pembibitan dibangun di setiap desa.
5. Transmigrasi 20 juta orang dari Pulau Jawa ke Sumatera selama 10 sampai 15 tahun.

Pelaksanaan Kasimo Plan

Berbagai inisiatif pemerintah selama beberapa tahun terakhir didasarkan pada Rencana Kasimo. Meski sebenarnya program ini bukanlah salah satu yang telah disetujui secara resmi. Dengan memperluas areal dan membangun pertanian rakyat, meningkatkan produksi benih unggul, membangun kebun pembibitan, meningkatkan irigasi, dan menjaga kesuburan tanah, pemerintah telah mulai mewujudkan dan melaksanakan tujuan yang telah dirancang. Dengan bertambahnya jumlah perahu, perahu motor dengan peralatannya, kredit, dan pelatihan untuk nelayan, industri perikanan laut juga berkembang. Kebutuhan ternak setiap daerah juga ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar perhatian dapat diberikan pada jenis ternak yang seharusnya lebih sering diproduksi.

Untuk mendongkrak posisi devisa, Kementerian Kemakmuran membentuk Biro Perdagangan yang menangani urusan ekspor-impor. Untuk memenuhi tuntutan pemerintah dan masyarakat Indonesia, dilakukan impor. Selain itu, ini dilakukan untuk mengontrol pasokan dan harga item. Selain Biro Perdagangan, didirikan pula biro koperasi, tujuannya untuk memperkuat perekonomian sesuai dengan gotong royong. Banyaknya jumlah koperasi yang terdaftar merupakan bukti bahwa Biro Koperasi efektif. Sampai Juli 1947, ada 2.700 koperasi yang diakui secara resmi. Selain itu, kredit niaga, industri, dan perikanan menengah dan besar disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Upaya yang lebih besar dimasukkan ke dalam perencanaan setelah Rencana Kasimo diperkenalkan pada tahun 1952. Akibatnya, pemerintahan Soekarno membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun antara tahun 1956 dan 1960, yang dianggap sebagai salah satu tradisi sukses sepanjang masa Orde Baru. Hanya saja, masa jabatan kabinet era Soekarno seringkali relatif singkat dan agenda bergeser. Gejolak politik dan ekonomi diakibatkan oleh hal ini. Kontraksi ekonomi, inflasi, dan laju pembangunan yang lamban adalah hasilnya. Biro Desain Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, didirikan oleh pemerintah pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II. Rencana pembangunan jangka panjang menjadi tanggung jawab lembaga ini. Menteri Desain Nasional adalah Ir. Juanda. Badan ini berhasil membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPT), yang disahkan DPR pada 11 November 1958 dan dimaksudkan untuk dilaksanakan antara tahun 1956 dan 1961.

Akan tetapi, karena berbagai alasan, ini juga tidak berfungsi. Pertama, penurunan ekspor dan penerimaan negara akibat krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958. Kedua, ketidakstabilan ekonomi akibat nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia dalam rangka memajukan perekonomian. pembebasan Irian Barat. Ketiga, adanya konflik antara pusat dan daerah, yang menyebabkan banyak dari mereka yang menerapkan strategi ekonominya sendiri. Hasil kemajuan selama ini tidak ideal karena keadaan sosial, politik, dan keamanan yang tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi kurang dominan dibandingkan dengan iklim politik.

Penetapan MPRS

Presiden Soekarno mendirikan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) antara tahun 1959 dan 1967. MPR Sementara (MPRS) menetapkan setidaknya tiga ketentuan yang menjadi landasan perencanaan nasional, yaitu TAP MPRS No. I/MPRS/1960 tentang manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional semesta Berencana 1961- 1969, dan ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman – pedoman Pelaksanaan Garis- Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Reforma Agraria

Reforma agraria merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, meskipun manfaatnya tidak segera diketahui setelah didistribusikan atau bahkan ketika sedang dilaksanakan. Selain penyediaan lahan, perluasan akses reforma agraria juga penting. Seiring dengan inisiatif dan inspirasi tambahan seperti pembinaan dan pelatihan. Menurut pandangan dunia pemerintahan saat ini yang menekankan bahwa penggunaan tanah sangat penting untuk kemakmuran dan ketentraman masyarakat, reforma agraria merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh negara. Reforma agraria melibatkan proses

pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan; proses ini hanya dapat dimulai jika tujuan telah ditetapkan, strategi implementasi telah dikembangkan, dan keuangan telah disisihkan untuk memenuhi tujuan kebijakan (Santoso, 1988: 5).

Perkembangan aturan Agraria Nasional selama Orde Lama terjadi antara tahun 1945 dan 1959. Struktur politik dan konstitusi Orde lama dimodifikasi sepanjang perencanaan. UU No. 5 Tahun 1960 melakukan modifikasi. Implementasi UUPA harus mampu mengubah sistem yang diadopsi Agrarische Wet (AW) 1870 untuk memenuhi kebutuhan pesanan sebelumnya. Untuk menghapus sistem feodal dan menegakkan hak konversi dalam hukum tanah, program Landreform Indonesia didirikan pada hukum adat yang berlaku pada saat itu. Karena dikeluarkannya peraturan tentang redistribusi tanah seperti yang disyaratkan oleh pasal-pasal UUPA, maka pelaksanaan land reform pada waktu itu merupakan kebijakan revolusioner pada masa pertumbuhan Orde Lama, menurut sejarah Orde Lama. Karena UUPA mengatur bahwa melepaskan tanah seluas-luasnya bagi petani dan rakyat merupakan prasyarat bagi pembangunan sistem ekonomi.

Dengan mengadopsi dasar-dasar industrialisasi, tujuan dari land reform ini adalah untuk menghapus semua dampak kolonialisme, imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme. Negara mengatur baik industri ringan maupun industri berat. Dengan menggunakan sumber TAP MPR RI Nomor 11/MPRS/1960 dan Manifes Politik, Ia menggambarkan adanya tiga filosofi terkait pembangunan: kemandirian ekonomi, oposisi terhadap eksploitasi manusia oleh manusia lain, dan oposisi terhadap kolonialisme, imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme. dengan landreform sebagai tujuan utama.

Semua undang-undang yang mengatur pertanahan pada tahun 1960 sampai 1966 harus mengacu pada undang-undang agraria, yang menjadi fokus persidangan terfokus. Reformasi tanah yang dilakukan didasarkan pada gagasan bahwa tanah harus digunakan untuk produksi daripada eksploitasi, sebuah konsep yang dikenal sebagai pembangunan universal dalam konteks ini. Dikeluarkannya Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian mengharuskan pelaksanaan land reform pada orde sebelumnya. Mengenai isi Perpu Nomor 56 Tahun 1960, jelas bahwa 2 hektar lahan pertanian akan dibagikan kepada masyarakat petani yang tidak memiliki harta. Namun pada kenyataannya upaya orde lama untuk melaksanakan land reform gagal karena beberapa sebab, di antaranya krisis penguasaan sumber daya agraria.

Hukum tanah diprioritaskan pada masa Orde Lama untuk menciptakan keadilan universal, dan kelompok mayoritas lemah diberikan fasilitas dan kemampuan untuk menguasai/memiliki tanah. Contoh kelompok ini antara lain petani yang kekurangan lahan atau yang lahannya sempit, petani kecil, petani yang menggarap perkebunan, dan koperasi sebagai kelompok yang dibentuk oleh kelompok. Selain itu, harus ada keadilan reparatif, yang mensyaratkan pemberian fasilitas dan fasilitas kelompok mayoritas yang tidak disediakan di bawah kebijakan pertanahan era sebelumnya.

Reforma agraria diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan dan penguasaan tanah. Pelaksanaan reforma agraria harus berpijak pada kerangka legislasi yang kokoh dan komprehensif untuk mewujudkan keadilan dan menjadikannya sebagai tumpuan pembangunan Indonesia. Sistem hukum dalam hukum agraria mengatur segala aspek pemilikan dan penguasaan atas tanah dan/atau sumber daya alam lainnya. Pada tataran kebijakan, ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dan sumber daya alam lainnya, justru lebih banyak disebabkan oleh tidak adanya tafsir resmi atas asas hak menguasai negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Nurlinda, 2015: 9).

SIMPULAN

Kasimo Plan atau sering disebut Rencana Kasimo merupakan suatu rencana pemerintah yang diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan perencanaan pembangunan terkhusus pada permasalahan pangan. Programnya cukup membantu masyarakat tapi sayangnya tidak bertahan lama karena politik yang tidak stabil. Setelah diluncurkannya Kasimo Plan pada tahun 1952 dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh. Sebagai hasilnya, pada tahun 1956-1960 pemerintah Soekarno berhasil disusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun, gagal di era orde lama namun di masa Orde Baru menjadi salah satu

tradisi yang dianggap berhasil. MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dibentuk pada zaman Pemerintahan Presiden Soekarno antara tahun 1959-1967 sebagai dasar perencanaan pembangunan era orde lama. Reforma agraria merupakan suatu alat untuk mensejahterakan rakyat, namun tidak serta merta dibagikan begitu saja, tidak setelah dibagikan dan langsung terasa manfaatnya. Reforma agraria diharapkan mampu menjadi solusi persoalan ketimpangan dan penguasaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Clarissah1, V. S., Hapsari, R. A., Husna, N. A., & Renaldo, M. A. (2020). Implementasi Reforma Agraria pada Masa Orde Lama dan Reformasi. *Wajah Hukum*, 4(1), 78. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.85>
- Collections, R. B. (n.d.). *06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI*. 27.
- Komala, R., Noor, T. I., & Yusuf, M. N. (2021). Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 8(2), 495. <https://doi.org/10.25157/jimag.v8i2.5335>
- Nain, U. (2019). *Pembangunan desa dalam perspektif sosiohistoris*. Garis Khatulistiwa.
- Rakhman, A. S. & Hidayat, A. (2022). *Kebijakan Ekonomi Soekarno pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. 5(1), 10.
- Hariyadi, Reza A. (2021). Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 259–276. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>
- Mardianto, S. & Djauhari, Achmad. (n.d.). *Pembangunan Pertanian Berbasis Ekoregion*. Adoc.Pub. Retrieved September 19, 2022, from <https://adoc.pub/pembangunan-pertanian-berbasis-ekoregion.html>
- Sutadi, R. D., Luthfi, A. N., & Mujiburrohmah, D. A. (2018). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, dan Orde Reformasi). *Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>
- Wicaksono, A., & Purbawa, Y. (2018). Hutang Negara dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.214>
- Magelhaes, L. (2018, June 8). Model Pemberdayaan Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan: Studi pada Program Energi Terbarukan di Kabupaten Jombang. *Journal of Economics Development Issues*, 1(1), 12-25. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jedi.v1i1.7>